

ISU PENYATUAN AKUNTANSI ATAS ASET TAK BERWUJUD

Rosinta Ria Panggabean

Management Department, School of Business Management, BINUS University
Jln. K. H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480
ria2311@yahoo.com

ABSTRACT

Globalization, technological innovation, and intense competition made companies change from labor-based business to knowledge-based business. Investors use financial statements published by the company as a basis for their investment decisions. Difficulties to compare and interpret financial statements prepared by different rules have led to demands from practitioners and academics on international harmonization, and even support for the unification of accounting standards around the world. Thus, the unification (convergence) of accounting is a big issue, especially at this time which the balance sheet of asset is increasingly dominated by intangible assets. Difficulties to recognize and to record the intangible assets in the financial statements especially Statement of Financial Position are regarded as a major issue in accounting for intangible assets. This article is a literature review of accounting for intangible assets and the impact of globalization, science, and technology against it. The discussion began with outlining the issue of unification of international accounting standards, the advantages, disadvantages, and the parties concerned in relation to accounting convergence. Article discussed later on intangible assets, along with the controversy issues that arised. Alternative solutions along with conclusions and suggestions were at the end of this article.

Keywords: Accounting, intangible assets

ABSTRAK

Globalisasi, inovasi teknologi dan persaingan yang ketat membuat perusahaan-perusahaan berubah dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (labor-based business) menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (knowledge-based business). Para investor menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasinya. Kesulitan membandingkan dan menginterpretasikan laporan keuangan yang disusun dengan aturan yang berbeda telah mengarah pada tuntutan dari praktisi dan akademisi atas harmonisasi internasional bahkan dukungan atas penyatuan standar akuntansi seluruh dunia. Dengan demikian, penyatuan (convergence) akuntansi merupakan suatu isu besar, terutama pada saat ini yang sisi aset neraca perusahaan-perusahaan makin didominasi oleh aset tak berwujud. Kesulitan untuk mengakui dan mencatat aset tak berwujud ke dalam laporan keuangan terutama Statement of Financial Position dianggap sebagai masalah utama terkait akuntansi atas aset tak berwujud. Artikel ini merupakan sebuah studi literatur mengenai akuntansi atas aset takberwujud beserta dampak globalisasi dan iptek terhadapnya. Pembahasan dimulai dengan menguraikan isu penyatuan standar akuntansi internasional, kelebihan, kekurangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam hubungannya dengan penyatuan akuntansi (accounting convergence). Kemudian akan dibahas tentang aset tak berwujud, beserta isu-isu kontroversi yang timbul. Alternatif pemecahan masalah beserta simpulan dan saran akan menjadi bagian akhir artikel ini.

Kata kunci: Akuntansi, aset tak berwujud

PENDAHULUAN

Sejak 1980-an, telah terjadi suatu gerak maju globalisasi dengan terbentuknya beberapa perekonomian regional seperti *European Single Market* (ESM), *North American Free Trade Agreement* (NAFTA), *ASEAN Free Trade Area* (AFTA), dan *Asia Pasific Economic Community* (APEC). APEC dan AFTA dirancang untuk meliberalisasikan perdagangan agar dapat mempercepat proses pembangunan, menarik minat investasi luar negeri, serta mencapai situasi saling melengkapi yang lebih besar diantara perekonomian di kawasan tersebut (Bariati, 2002). Tujuan APEC adalah membentuk suatu kawasan perdagangan dan investasi yang bebas di tahun 2010 untuk anggota-anggota yang merupakan negara maju, dan di tahun 2020 untuk anggota-anggota negara berkembang. Tujuan APEC tersebut menyebabkan suatu lingkungan bisnis yang lebih kompetitif bagi perusahaan di negara-negara anggota APEC, baik dalam hal memproduksi serta memasarkan barang dan jasa maupun menarik investor.

Globalisasi, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat ini membuat perusahaan-perusahaan berubah dari bisnis yang didasarkan pada tenaga kerja (*labor-based business*) menuju bisnis berdasarkan pengetahuan (*knowledge based business*). Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan ini, modal yang konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aset fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi (Sawarjuwono & Kadir, 2003). Hal tersebut tercermin pada laporan keuangan yang di dalamnya porsi aset takberwujud makin bertambah dibandingkan dengan porsi aset tetap lainnya.

Para investor menggunakan laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi. Jika kondisi yang diharapkan APEC terwujud, dalam situasi regulasi ekonomi pemerintah negara-negara anggota APEC relatif sama, pilihan atas perlakuan akuntansi yang digunakan akan berpengaruh besar pada tampilan laporan keuangan yang diharapkan dapat menarik perhatian investor pada perusahaan tersebut. Dengan demikian, penyatuan (*convergence*) akuntansi merupakan suatu isu besar, terutama saat ini yang sisi aset neraca perusahaan makin didominasi aset takberwujud.

Pelaporan keuangan memiliki tiga tujuan dan fungsi yang spesifik, yaitu: (1) alokasi aset, modal, dan investasi, (2) “*contracting*” dan “*ex post setting up*”, dan (3) pengamanan dan pemantauan perusahaan (Wallman, 1995). Sekarang banyak ahli yang berpendapat bahwa pelaporan keuangan dan perusahaan yang ada saat ini tidak mampu menandingi akselerasi perubahan dalam dunia usaha, sehingga laporan itu memiliki risiko menjadi kurang bermanfaat, ditambah dengan kenyataan bahwa praktik-praktik akuntansi di berbagai bagian dunia sangat bervariasi, misalnya analisis neraca, definisi aset, dan penilaian aset. Kesulitan membandingkan dan menginterpretasikan laporan keuangan yang disusun dengan aturan yang berbeda telah mengarah pada tuntutan dari praktisi dan akademisi atas harmonisasi internasional bahkan dukungan atas penyatuan standard akuntansi seluruh dunia.

International Accounting Standard Committee didirikan pada 1973 dan berkembang meliputi perwakilan dari 91 negara. Terdapat dua tujuan dari IASC, yaitu: pertama, untuk memformulasikan dan mempublikasikan pada media publik, standar akuntansi yang perlu diobservasi dalam presentasi laporan keuangan serta untuk mempromosikan persetujuan di seluruh dunia dan observasinya; kedua, untuk bekerja secara umum demi peningkatan dan harmonisasi peraturan. Pada 2000 IASC berubah menjadi *International Accounting Standard Board* (IASB). IASB berusaha untuk menyatukan standar-standar yang berbeda ini dengan menerbitkan *International Accounting Standards* (IASs, sekarang dikenal sebagai *International Financial Reporting Standards – IFRSs*) di antaranya IAS 38 tentang *Intangible Assets*.

METODE

Artikel ini merupakan sebuah studi literatur mengenai akuntansi atas aset tak berwujud beserta dampak globalisasi dan iptek terhadapnya. Pembahasan dimulai dengan menguraikan isu penyatuan standar akuntansi internasional, kelebihan, kekurangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam hubungannya dengan penyatuan akuntansi (*accounting convergence*). Kemudian akan dibahas tentang aset tidak berwujud, beserta isu-isu kontroversi yang timbul. Alternatif pemecahan masalah beserta kesimpulan dan saran akan menjadi bagian akhir makalah ini.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Dari perspektif yang paling umum, tujuan dari akuntansi dan pelaporan keuangan adalah menyediakan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditur, pemantau, dan pihak lainnya – termasuk pegawai, pemasok, dan pelanggan– dalam membuat keputusan investasi, pemberian kredit, pemantauan, dan lainnya. Wallman (1995) menyatakan bahwa pelaporan keuangan memiliki tiga tujuan dan fungsi yang spesifik. Pertama, alokasi aset, modal, dan investasi, pemasok modal menginginkan informasi yang andal dan relevan mengenai investasi mereka serta peluang yang ada. Baik keberadaan maupun kewajiban penggunaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang telah distandardisasi bukanlah prasyarat bagi perolehan modal. Contohnya, penyedia dan pengguna modal, termasuk modal manusia, dapat secara efektif mendapatkan informasi seperti itu dalam situasi tidak ada sistem yang distandardisasi. Akan tetapi, sistem terstandardisasi mengurangi biaya transaksi dan investigasi yang akan dikeluarkan menurut perjanjian kontrak. Jadi pengungkapan keuangan yang sesuai dengan standar yang didefinisikan dengan baik, mudah dipahami, dan tepat, membantu pengguna dan penyedia modal dengan cara yang *cost-effective*, dan karenanya mengurangi biaya perolehan modal. Kedua, “*contracting*” dan “*ex post setting up*”, laporan keuangan juga digunakan sehubungan dengan pengaturan kontraktual dan penyelesaian *ex post*. Sebagai contoh, pemberi pinjaman seringkali mewajibkan si peminjam untuk menjaga rasio-rasio keuangan tertentu dan untuk mematuhi persyaratan kredit berdasarkan ukuran akuntansi. Dengan menyediakan keseragaman dalam pengukuran dan pelaporan, seperti juga atestasi yang relevan, akuntansi dan pelaporan keuangan memfasilitasi penyelesaian *ex post* di antara pihak-pihak yang terikat perjanjian, dan karenanya mendorong adanya pengaturan perjanjian yang *cost-efficient*. Ketiga, pengamanan dan pemantauan perusahaan. Akuntansi dan pelaporan keuangan juga membantu pihak luar memantau kinerja dari manajemen perusahaan, dan manajemen perusahaan untuk menilai kinerjanya sendiri demikian pula dengan pegawai perusahaan.

Sekarang banyak ahli yang berpendapat bahwa pelaporan keuangan dan perusahaan yang ada saat ini tidak mampu menandingi akselerasi perubahan dalam dunia usaha, sehingga laporan itu memiliki risiko menjadi kurang bermanfaat, ditambah dengan kenyataan bahwa praktik-praktik akuntansi di berbagai bagian dunia sangat bervariasi, misalnya analisis neraca, definisi aset, dan penilaian aset. Alasan utama terjadinya penurunan manfaat akuntansi dan pelaporan keuangan dapat disajikan dalam 4W (*who, what, when, dan where*) dan 1 H (*how*).

Perubahan Konsep Perusahaan (Who is Company?)

Batasan perusahaan menjadi lebih sulit untuk didefinisikan. Revolusi informasi membawa masyarakat pada tahapan yang di dalamnya bisnis dapat berjalan dengan fleksibilitas yang lebih besar daripada sebelumnya. Laporan dari AICPA Breakthrough Taskforces menyimpulkan bahwa sampai dengan tahun 2005, terjadi penurunan ukuran dari entitas legal mengingat perusahaan, pemasoknya, pegawai, dan pelanggan bekerja bersama berdasarkan sistem transaksi berbasis hubungan

(*relationship*), yang akan memusatkan perhatian pada pembentukan kelompok usaha atau perusahaan maya yang secara agregat mungkin lebih besar daripada entitas yang ada saat ini.

Isu Pengakuan dan Pengukuran (What)

Dahulu aset dan kewajiban yang digunakan untuk menghasilkan kemakmuran diakui dalam laporan keuangan dengan harga pokok; dan itu adalah “berwujud” seperti peralatan. Namun pergeseran kepada ekonomi berbasis pengetahuan telah menciptakan atau memusatkan perhatian yang lebih pada seluruh kategori aset yang berbeda seperti nama merek dagang dan aset “lunak” lainnya seperti yang telah disebutkan. Dengan pengecualian tertentu, seperti pembelian nama merek dagang, aset “lunak” ini tidak diakui dalam laporan keuangan. Kendala utama terkait dengan kesulitan penilaian, ketidakpastian yang melekat pada aset jenis ini dan potensi kecurangan atas hasilnya.

Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (When to Report?)

Laporan tahunan dan triwulanan yang ada sekarang –yang mengandalkan kepada hal yang diakui sebagai laporan inti– tidak mencantumkan dan mengomunikasikan perkembangan material dalam waktu yang cukup guna memenuhi kebutuhan informasi dari pelaku pasar. Siklus produk dipersingkat, praktik manajemen risiko telah meningkat dan lebih umum dan produk lebih cepat kadaluarsa dibandingkan sebelumnya.

Saluran Distribusi Informasi (Where and How)

Kita juga harus menyadari bahwa saluran distribusi yang ada saat ini dan metode diseminasi dan analisisnya adalah terkait dengan yang dilaporkan sebagaimana yang dinyatakan dalam GAAP. Sampai saat ini, tidaklah praktis, secara fisik, menyediakan informasi yang lebih terinci karena tidak ada mekanisme yang wajar untuk membagikan informasi sangat banyak seperti itu, dan yang lebih penting lagi adalah tidak ada mekanisme yang layak untuk menganalisisnya. Pada masa datang, lebih banyak pengguna akhir yang akan memiliki akses kepada basis data elektronik dan analitis yang akan membuat informasi terurai menjadi sangat bermanfaat dan tersedia tepat waktu bagi mereka.

Pihak-pihak yang Berkepentingan

Globalisasi ekonomi memang sedang dan akan terus terjadi. Dengan semakin meningkatnya globalisasi pasar modal, ada pergerakan untuk harmonisasi praktik-praktik akuntansi internasional. Standar akuntansi keuangan yang mampu melintasi batas-batas negara telah menjadi suatu kebutuhan untuk digunakan sebagai perangkat untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan. Grup partisipan utama pengguna dan organisasi yang tertarik dalam kaitannya dengan perusahaan multinasional dan harmonisasi atau standardisasi akuntansi internasional adalah: pemerintah, serikat perdagangan dan pekerjanya, para investor (termasuk analis keuangan), bankir dan pemberi pinjaman, publik umum, para akuntan dan auditor.

Secara sederhana, harmonisasi praktik akuntansi dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mencapai persamaan (dalam arti *similarity*) mengenai pengungkapan (*disclosure*) dan metode pengukuran dari suatu negara ke negara lain. Pada 1973 telah didirikan International Accounting Standards Committee (IASC) oleh 9 negara, yaitu Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Tujuan dari IASC adalah merumuskan dan mempublikasikan, bagi kepentingan publik, standar akuntansi yang akan diamati dalam menyajikan laporan keuangan dan untuk mempromosikan agar Standar Akuntansi Internasional diterima dan ditaati di seluruh dunia; dan secara umum bekerja bagi pengembangan dan harmonisasi peraturan, standar akuntansi, dan prosedur-prosedur yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan.

Hal lain yang membantu IASC untuk mencapai tujuannya adalah gerakan yang dilakukan oleh *the International Organization of Securities Commissions* pada 1989 di Montreal (Cowan, 1991). Mereka menyatakan bahwa jika IASC dapat mengurangi jumlah opsi dalam standar-standarnya dan menyediakan lebih banyak pedoman dalam menerapkan peraturan pada 1992, para regulator pasar modal berjanji untuk mendukung standar internasional dalam pasar modal mereka. Beberapa negara Eropa Timur dan Amerika Latin yang berusaha untuk merangkul kapitalisme gaya Barat juga ikut andil dalam perkembangan IASC. Untuk menarik minat modal asing, negara-negara ini “berbelanja” standar akuntansi yang akan dianggap dapat diterima oleh para investor dari berbagai kebangsaan. Dan karena mereka tidak memiliki standar yang dikembangkan sendiri untuk dilindungi, negara-negara ini dapat memberikan dukungan yang diperlukan IASC bagi standar-standarnya untuk menjadi standar internasional yang sebenarnya.

Manfaat, Biaya-biaya, dan Hambatan Harmonisasi Standar Akuntansi

Harmonisasi standar akuntansi internasional memiliki beberapa manfaat, yaitu untuk: meningkatkan efisiensi pelaporan atas aktivitas investasi dan pendanaan yang dilakukan perusahaan multinasional; meningkatkan daya banding dan kelengkapan (*comprehensiveness*) laporan keuangan antarnegara; mendorong penggunaan standar dan praktik akuntansi berkualitas tinggi secara meluas; menyediakan standar akuntansi bagi negara-negara yang terbelakang atau negara-negara dengan sumber daya terbatas yang tidak memiliki program penyusunan standar akuntansi sendiri, sehingga menghindarkan mereka dari pemborosan waktu dan biaya dalam penyusunan standar akuntansi lokal; memudahkan regulator sekuritas dalam mengawasi perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di pasar modal tempat mereka berbisnis; serta penyebaran yang meluas atas standar dan praktik akuntansi yang berkualitas tinggi. Kecenderungan untuk standar akuntansi di seluruh dunia akan ditingkatkan ke level tertinggi yang mungkin dicapai dan akan konsisten dengan kondisi lokal ekonomi, hukum, dan sosial.

Namun begitu, terdapat berbagai biaya yang harus ditanggung untuk mencapai harmonisasi. Besaran biaya yang terjadi tergantung dari seberapa jauh harmonisasi telah dicapai. Umumnya, biaya-biaya utama harmonisasi meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, biaya-biaya sosial untuk membuat setiap orang menerima dengan baik (*comfortable*) standar akuntansi yang telah ditetapkan. Pendidikan dan lingkungan pemakai laporan keuangan sering kali membuatnya mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan pendekatan penyusunan laporan keuangan yang berbeda. Kedua, biaya-biaya moneter, yang dikeluarkan perusahaan untuk mengubah kebijakan dan prosedur akutansinya serta melakukan pendidikan/pelatihan terhadap karyawannya atas standar akuntansi yang baru. Ketiga, biaya politik yang harus ditanggung negara karena dihentikannya beberapa pengendalian tertentu dalam partisipasi di pasar global.

Di samping itu, ada beberapa hambatan terwujudnya harmonisasi, yaitu: pertama, perusahaan multinasional menghadapi masalah-masalah yang berbeda dari entitas di negara berkembang sehingga diyakini bahwa harmonisasi hanya bermanfaat untuk perusahaan multinasional sementara perusahaan lokal tidak memperoleh manfaat yang sama. Kedua, ada kecenderungan untuk enggan berubah karena masyarakat terlanjur merasa nyaman dengan praktik dan rutinitas sehari-hari sehingga menjadi tidak nyaman ketika suatu perubahan diusulkan. Ketiga adalah emosional dalam menghadapi perubahan yang diusulkan. Emosionalisme ini lebih dari sekadar enggan untuk berubah karena emosionalisme merupakan respons yang lebih langsung, sering berkaitan dengan ide atau sikap jangka panjang. Keempat adalah kesulitan dalam mengoordinasi perubahan diantara semua partisipan yang terkait. Dalam harmonisasi, pihak yang bertugas mengoordinasi implementasi standar baru adalah IASC yang tidak mempunyai kekuasaan langsung. IASC tidak dapat memaksakan pemakaian standar internasional kepada tiap-tiap negara. Kelima, pengguna utama informasi keuangan berbeda diantara negara-negara. Sebagai contoh, di Inggris dan AS, pengguna utama adalah para investor karena lingkungan bisnis di sana didasarkan pada pasar modal. Di sisi lain, di Jerman dan di negara-negara

Eropa daratan lainnya, pengguna utama adalah pemerintah dan otoritas pajak, yang keduanya memiliki posisi yang lebih penting. Kelompok pengguna yang berbeda memerlukan informasi yang berbeda. Investor memerlukan informasi yang relevan untuk keputusan investasinya. Otoritas pajak memerlukan informasi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Pemerintah memerlukan informasi yang dihasilkan dengan mempertimbangkan perencanaan nasional yang terstandarisasi. Para pegawai memerlukan informasi dari jenis sosial dan manajemen memerlukan informasi untuk mengelola dan mengontrol perusahaan. Sulit untuk memenuhi seluruh kebutuhan pelaporan keuangan yang berbeda ini dalam suatu standar yang pasti tanpa banyak alternatif dan fleksibilitas dalam penerapan standar. Keenam, situasi hukumbervariasi diantara negara-negara juga menjadi suatu hambatan bagi penyatuan akuntansi. Beberapa standar mungkin tidak menjadi perhatian utama bagi beberapa negara, terutama mereka yang tidak terlalu memiliki pengaruh dalam proses penetapan standar. Tugas untuk penetapan standar diserahkan kepada suatu institusi asing daripada suatu perwakilan yang dipilih. Dalam hal ini, terdapat ancaman terhadap independensi negara. Sistem hukum memiliki akibat langsung pada akuntansi. Undang-undang mengandung aturan-aturan akuntansi yang rinci yang menspesifikasi aturan dan prosedur akuntansi secara menyeluruh. Di negara-negara tertentu akuntansi secara langsung bergantung pada persetujuan legislatif karena pemerintah mengharuskan persetujuan ini (Lawrence, 1996). Dalam beberapa kasus, penyatuan dalam pelaporan akuntansi akan memerlukan perubahan didalam legislasi. Ketujuh, perkembangan akuntansi harus dipertimbangkan karena sejarah perkembangan akuntansi di setiap negara berbeda. Dengan demikian, titik awal menuju pada proses penyatuan akuntansi juga berbeda. Untuk negara-negara yang memiliki sejarah menggunakan standar akuntansi yang dihasilkan oleh badan independen dari sektor swasta, akan lebih mudah untuk menggunakan standar akuntansi internasional dibandingkan dengan negara-negara yang menggunakan panduan dari pemerintah (Lawrence, 1996). Perkembangan dari suatu badan akuntansi profesional memainkan suatu peran yang penting dalam proses penyatuan akuntansi di suatu negara. Negara-negara yang kurang memiliki badan seperti itu akan sulit untuk mengejar proses penyatuan.

Pentingnya Aset Tak Berwujud

Globalisasi, inovasi teknologi, dan persaingan yang ketat pada abad ini memaksa perusahaan-perusahaan mengubah cara mereka melakukan bisnisnya. Ekonomi juga bertransformasi dari *production economy* (p-economy) yang penggunaan pengetahuan sebagai faktor produksi sangat sedikit; dan faktor produksi utamanya adalah modal fisik seperti tanah, tenaga kerja, uang, mesin, dll menjadi *knowledge economy* (k-economy) yang investasi terbesar yang dilakukan merupakan investasi dalam bentuk pengetahuan, modal intelektual, dan aset takberwujud. Seiring dengan perubahan ekonomi yang memiliki karakteristik ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan dengan penerapan manajemen pengetahuan, maka kemakmuran suatu perusahaan akan bergantung pada suatu penciptaan transformasi dan kapitalisasi dari pengetahuan itu sendiri.

Dalam sistem manajemen yang berbasis pengetahuan ini, maka modal yang konvensional seperti sumber daya alam, sumber daya keuangan, dan aset fisik lainnya menjadi kurang penting dibandingkan dengan modal yang berbasis pada pengetahuan dan teknologi. Dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka akan dapat diperoleh cara menggunakan sumber daya lainnya secara efisien dan ekonomis, yang nantinya akan memberikan keunggulan bersaing. Berkurang atau bahkan hilangnya aset tetap dalam neraca perusahaan tidak menyebabkan hilangnya penghargaan pasar terhadap mereka. Hal ini tercermin dari banyaknya perusahaan yang memiliki aset berwujud yang tidak signifikan dalam laporan keuangan namun penghargaan pasar atas perusahaan-perusahaan tersebut sangat tinggi.

Tabel 1 Nilai Pasar dan Aset (dalam Miliar Dolar)

Company	Market Value	Revenue	Profits	Net Assets	Hidden Value
General Electric	169	79	7.3	31	138 (82%)
Coca-cola	148	19	3.5	6	142 (96%)
Exxon	125	119	7.5	43	82 (66%)
Microsoft	119	9	2.2	7	112 (94%)
Intel	113	21	5.2	17	96 (85%)

(Sumber: Roos, Roos, Dragonetti, & Edvinsson, 1997:2)

Berkaitan dengan fenomena yang berkembang, kebutuhan akan informasi oleh para investor, kreditur, dan pengguna laporan keuangan lainnya mengenai nilai perusahaan yang sesungguhnya tentunya menjadi makin penting. Di lain pihak akuntansi tradisional lebih terfokus pada penilaian aset berwujud perusahaan dengan prinsip nilai historisnya. Biaya historis dianggap sebagai metode pengukuran yang paling obyektif, andal, dan mudah untuk diverifikasi (Hartono, 2001). Selain itu sebagai sarana untuk mendistribusikan harga pokok (*cost*) pada pendapatan untuk penerapan konsep *matching cost against revenue*. Namun pendapat ini dikritik oleh penganut *Positif Accounting Theory*, bahwa laba yang didasarkan biaya historis tidak mempunyai nilai informasi dan nilai prediktif. Dengan keterbatasan akuntansi tradisional tersebut tampaknya kepentingan dunia usaha akan informasi nilai perusahaan yang sesungguhnya tidak dapat terakomodasi.

Definisi dan Sifat Dasar Aset Tak Berwujud

Definisi aset tak berwujud berdasarkan PSAK No.19 (Revisi 2010) adalah aset non moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Sedangkan dalam PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 10 menyatakan bahwa dari definisi yang ada terdapat tiga kriteria utama bagi aset tak berwujud, yaitu:

Pertama, keteridentifikasian, dalam paragraf 11 PSAK No.19 (Revisi 2010) dinyatakan bahwa keteridentifikasian aset tak berwujud harus dapat dibedakan secara jelas dengan *goodwill*. Perbedaan paling jelas adalah bahwa *goodwill* terjadi akibat proses penggabungan usaha berbentuk akuisisi. Manfaat ekonomis yang diharapkan timbul dari sinergi antara aset yang diperoleh yang dapat diidentifikasi atau dari aset, yang secara individual, tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam laporan keuangan walaupun yang mengakuisisi bersedia untuk membayar aset tersebut. Selain itu, suatu aset dapat dibedakan secara jelas dengan *goodwill* jika aset tersebut dapat dipisahkan. Paragraf 12 menyatakan suatu aset disebut “dapat dipisahkan” jika perusahaan dapat menyewakan, menjual, menukarkan, atau mendistribusikan manfaat ekonomis masa depan yang terdapat pada aset tersebut tanpa melepaskan manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset lain yang digunakan dalam aktivitas yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Dapat dipisahkan tidak selalu menjadi prasyarat keteridentifikasian karena perusahaan dapat melakukan identifikasi dengan menggunakan cara lain seperti misalnya melalui pengalihan hak hukum, proyek internal yang bertujuan menciptakan hak hukum dan manfaat ekonomis masa depan yang timbul.

Kedua, selain kriteria keteridentifikasian, PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 13 juga memberikan penekanan atas pengendalian aset tak berwujud. Perusahaan disebut “mengendalikan suatu aset” jika perusahaan memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tersebut dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomis tersebut. Kemampuan perusahaan untuk mengendalikan manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tidak berwujud biasanya timbul dari hak hukum yang dapat ditegakkan dalam suatu pengadilan. Jika hak hukum itu tidak ada, perusahaan akan lebih sulit menunjukkan adanya pengendalian. Akan tetapi, penegakan hukum suatu hak bukan merupakan prasyarat bagi pengendalian karena perusahaan dapat saja mengendalikan manfaat ekonomis dengan cara lain. Manfaat ekonomis masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Perusahaan

mengendalikan manfaat ekonomis tersebut jika misalnya perusahaan memiliki suatu pengetahuan yang dilindungi oleh hak hukum, seperti hak cipta dan pembatasan perjanjian dagang (sepanjang diizinkan oleh peraturan) atau oleh kewajiban hukum sebagai pegawai untuk menjaga kerahasiaan.

Ketiga, manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang dan jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset tersebut oleh perusahaan. Misalnya, penggunaan hal kekayaan intelektual dalam suatu proses produksi tidak meningkatkan pendapatan masa depan, tetapi menekan biaya produksi masa depan (paragraf 17).

Pengakuan dan Pengukuran Aset Tak Berwujud

PSAK No. 19 (Revisi 2010) paragraf 18 dan 21 menyatakan bahwa aset tak berwujud dapat diakui, jika dan hanya: (a) memenuhi definisi aset tak berwujud; (b) memiliki kemungkinan besar bahwa perusahaan akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset tersebut; dan (c) biaya perolehan atas aset tersebut dapat diukur secara andal. Dalam menilai kemungkinan adanya manfaat ekonomis masa depan aset tak berwujud, perusahaan harus menggunakan asumsi yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan, yang merupakan estimasi terbaik manajemen atas kondisi ekonomi yang berlaku sepanjang masa manfaat aset tersebut. Dan untuk menilai tingkat kepastian akan adanya manfaat ekonomis masa depan yang timbul dari penggunaan aset tak berwujud, perusahaan mempertimbangkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal aset tak berwujud dengan memberikan penekanan pada bukti eksternal. Aset tak berwujud ini memberikan hak khusus secara legal atau keunggulan kompetitif tertentu. APB opini No.17 menyatakan bahwa secara umum aset tak berwujud dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu pembelian dan pengembangan internal. Dengan memahami perolehan aset tak berwujud, perusahaan dapat mengukur nilai atas aset tak berwujud, sebagai berikut.

Pertama adalah pembelian. Aset tak berwujud yang dibeli dari pihak lain dicatat sebesar nilai perolehannya, yaitu nilai kas atau *fair market value* yang dibayar atau nilai *present value* dari kewajiban yang timbul akibat perolehan tersebut. Nilai perolehan meliputi semua beban akuisisi dan pengeluaran yang terjadi untuk mendapatkan aset tak berwujud tersebut hingga dapat dipergunakan, seperti harga beli, biaya legal, dan biaya tidak terduga lainnya. Lebih jauh PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 25 menyatakan jika suatu aset tak berwujud diperoleh secara terpisah, biaya aset tak berwujud biasanya dapat diukur secara andal. Hal itu akan tampak jelas jika pembayaran dilakukan dalam bentuk uang tunai atau aset moneter lainnya. Biaya perolehan suatu aset tak berwujud terdiri dari harga beli, termasuk bea masuk (impor), pajak yang sifatnya tidak dapat direstitusi (*non-refundable*) dan semua pengeluaran yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap digunakan sesuai dengan tujuannya, misalnya imbalan profesional konsultan hukum. Jika ada diskonto atau rabat, diskonto atau rabat itu mengurangi biaya perolehan aset. Jika pembayaran suatu aset tak berwujud ditangguhkan sampai melebihi periode penjualan kredit yang normal, biaya perolehannya adalah setara nilai tunai, selisih antara nilai tersebut dan total pembayaran diakui sebagai beban bunga selama masa kredit kecuali jika selisih tersebut dikapitalisasi. Jika aset tak berwujud diperoleh dengan saham atau pertukaran aset lain, nilai perolehan aset tak berwujud adalah sebesar *fair market value* aset atau *fair market value* aset tak berwujud, yang penilaian dengan bukti yang lebih jelas yang dipergunakan. Seperti dinyatakan dalam PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 28 suatu aset tak berwujud mungkin diperoleh melalui pertukaran atau tukar tambah dengan aset tak berwujud yang tidak sejenis atau dengan aset lainnya. Biaya perolehan aset tak berwujud tersebut diukur sebesar nilai wajar aset yang diterima, yang sama dengan nilai wajar aset yang diserahkan, setelah diperhitungkan dengan jumlah uang tunai atau setara kas yang diserahkan.

Kedua adalah penciptaan atau pengembangan internal. Ketika aset tak berwujud diciptakan secara internal, penilaian aset tersebut menjadi sangat sulit. Beban yang terjadi untuk pengembangan aset

tak berwujud itu umumnya langsung dibiayai. Oleh sebab itu, meskipun perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan internal yang menimbulkan beban yang substansial untuk menciptakan aset tak berwujud, beban tersebut langsung dibiayai. Pro dan kontra terjadi berkaitan dengan penciptaan internal aset tak berwujud ini. Dari sejumlah argumentasi tentang aset tak berwujud itu, hanya beban langsung dalam mendapatkan aset tidak berwujud yang dapat secara internal dikapitalisasi, seperti beban legal. Dalam PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 33 dinyatakan bahwa sesuai dengan PSAK 22: Kombinasi Bisnis, jika aset takberwujud diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya perolehan aset takberwujud adalah nilai wajar aset pada tanggal akuisisi. Kadang-kadang suatu aset tak berwujud yang diperoleh dari kombinasi bisnis hanya dapat dipisahkan bersama dengan aset berwujud atau tak berwujud terkait. Dalam kasus demikian, pihak pengakuisisi mengakui sekelompok aset sebagai aset tunggal yang terpisah dari *goodwill* jika nilai wajar dari setiap aset di dalam kelompok tersebut tidak dapat diukur secara andal (paragraf 36). Oleh karena itu, di samping memenuhi ketentuan umum dalam pengakuan dan pengukuran awal aset tak berwujud, PSAK No.19 (Revisi 2010) memberikan panduan bagi aset tak berwujud yang dihasilkan di dalam perusahaan. Dalam paragraf 51 PSAK No.19 (Revisi 2010) menggolongkan proses dihasilkannya aset tak berwujud ke dalam dua tahap, yaitu: tahap penelitian atau tahap riset dan tahap pengembangan.

Dalam paragraf 62, PSAK No.19 (Revisi 2010) menyatakan dengan tegas bahwa merek, daftar pelanggan yang dihasilkan secara intern, dan hal-hal sejenis yang substansinya sama tidak boleh diakui sebagai aset tak berwujud. Pernyataan ini menganut pandangan bahwa pengeluaran dalam rangka menghasilkan merek, daftar pelanggan yang dihasilkan secara intern, dan hal-hal yang sejenis yang substansinya sama tidak dapat dibedakan dengan biaya untuk mengembangkan usaha secara keseluruhan. Oleh karena itu, hal-hal tersebut tidak diakui sebagai aset tak berwujud.

Pengukuran Setelah Pengakuan Aset Tak Berwujud

PSAK No.19 (Revisi 2010) mewajibkan entitas memilih model biaya atau model revaluasi sebagai kebijakan akuntansinya. Jika aset takberwujud dicatat dengan menggunakan model revaluasi, semua aset lain dalam kelompok tersebut diperlakukan dengan menggunakan model yang sama, kecuali tidak terdapat pasar aktif untuk aset tersebut. Prinsip *matching cost against revenue* menentukan bahwa biaya perolehan aset tak berwujud harus dialokasikan berdasarkan periode yang aset tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat. Berkaitan dengan amortisasi atas aset tak berwujud, PSAK No.19 (Revisi 2010) juga mengatur bahwa jumlah yang dapat diamortisasi dari aset tak berwujud harus dialokasikan secara sistematis berdasarkan perkiraan terbaik dari masa manfaatnya. Berdasarkan PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 88 entitas menilai apakah umur manfaat aset tak berwujud terbatas atau tidak terbatas dan, jika terbatas, jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit serupa yang dihasilkan selama umur manfaat. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam kembali dalam menentukan masa manfaat suatu asettakberwujud, yaitu: (a) perkiraan pemakaian aset oleh entitas dan efisiensi pengelolaannya oleh tim manajemen yang lain; (b) siklus hidup produk (*product life cycles*) yang lazim bagi aset tersebut dan informasi yang beredar mengenai estimasi masa manfaat aset sejenis yang digunakan dengan cara yang sama; (c) keusangan teknis, teknologi, atau jenis-jenis keusangan lainnya; (d) stabilitas industri tempat aset tersebut beroperasi dan perubahan-perubahan dalam permintaan pasar atas produk dan jasa yang dihasilkan oleh aset tersebut; (e) perkiraan tindakan oleh pesaing atau calon pesaing; (f) tingkat/jumlah pengeluaran untuk pemeliharaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan manfaat ekonomis masa depan dari aset dan kemampuan serta maksud entitas untuk mencapai tingkat tersebut; (g) periode pengendalian aset dan pembatasan hukum atau pembatasan lainnya yang dikenakan atas penggunaan aset tersebut, seperti tanggal berakhirnya sewa guna usaha yang terkait; dan (h) ketergantungan masa manfaat aset tersebut atas masa manfaat aset lainnya dari entitas.

Dengan pesatnya perkembangan teknologi, piranti lunak komputer, dan banyak aset tak berwujud lainnya rentan terhadap keusangan teknologi. Oleh sebab itu, masa manfaat aset tak

berwujud cenderung pendek. Estimasi masa manfaat suatu aset tak berwujud pada umumnya menjadi kurang andal sejalan dengan makin panjangnya masa manfaat aset tersebut. Berdasarkan pandangan ini dalam PSAK No.19 (Revisi 2010) paragraf 104 dinyatakan bahwa periode amortisasi dan metode amortisasi aset tak berwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah setidaknya setiap akhir tahun buku.

Jika pengendalian atas masa manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset tak berwujud diperoleh melalui hak hukum yang diberikan selama suatu periode tertentu, masa manfaat aset tak berwujud tidak boleh melebihi periode hak hukum tersebut kecuali: hak hukum tersebut dapat diperbarui; dan terdapat bukti yang mendukung pembaruan umur manfaat tidak menimbulkan biaya yang signifikan. Beberapa faktor yang dapat memberikan indikasi kepastian pembaruan hak hukum, yaitu: biaya pembaruan tidak signifikan bagi entitas jika dibandingkan dengan manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan akan diterima oleh entitas dari pembaruan tersebut; terdapat bukti (misalnya, berdasarkan pengalaman masa lampau) bahwa hak hukum tersebut akan diperbarui; dan terdapat bukti bahwa persyaratan untuk memperoleh pembaruan hak hukum, jika ada, akan dipenuhi.

Metode amortisasi harus mencerminkan pola konsumsi manfaat ekonomis oleh perusahaan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, harus digunakan metode garis lurus. Amortisasi biasanya diakui sebagai beban. Namun kadang-kadang manfaat ekonomis yang terkandung dalam suatu aset diserap oleh perusahaan untuk menghasilkan aset lain dan tidak menimbulkan beban. Dalam hal demikian, beban amortisasi merupakan bagian dari harga pokok aset lain tersebut dan dimasukkan ke dalam nilai tercatatnya. Misalnya, amortisasi aset tak berwujud yang digunakan dalam proses produksi dimasukkan ke dalam nilai tercatat persediaan. Nilai sisa suatu aset tak berwujud seharusnya diasumsikan sama dengan nol, kecuali ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tersebut pada akhir masa manfaatnya atau ada pasar aktif bagi aktiva tersebut yang nilai sisa aset dapat ditentukan dengan mengacu pada harga yang berlaku di pasar tersebut dan terdapat kemungkinan yang cukup besar bahwa pasar yang aktif tersebut akan tetap ada pada akhir masa manfaat aset. Suatu aset tak berwujud tidak boleh lagi diakui, dan harus dihilangkan dari neraca, saat aset tersebut dilepas atau ketika tidak ada lagi manfaat masa depan yang diharapkan dari penggunaannya dan pelepasan yang dilakukan sesudahnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan suatu aset tak berwujud ditentukan dengan menghitung selisih antara jumlah penerimaan bersih dari pelepasan aset dan nilai tercatat aset tersebut, serta diakui sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan Aset Takberwujud

PSAK No. 19 (Revisi 2010) paragraf 119 menyatakan bahwa laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal berikut untuk setiap golongan aset tak berwujud (seperti nama merek; piranti lunak komputer; lisensi dan waralaba, hak cipta, paten, dan kekayaan intelektual, resep, formula model, desain, protoripe, dll), dengan membedakan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara intern dengan aset tak berwujud lainnya: (a) umur manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan; (b) metode amortisasi yang digunakan; (c) jumlah tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode; (d) unsur pada laporan keuangan yang didalamnya terdapat amortisasi aset tak berwujud; dan (e) rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: (i) penambahan asettakberwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam perusahaan dan dari penggabungan usaha; (ii) penghentian dan pelepasan aset tak berwujud; (iii) rugi penurunan nilai yang diakui pada laporan laba rugi periode berjalan sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset (Jika ada); (iv) rugi penurunan nilai yang dibalik pada laporan laba rugi periode berjalan sesuai dengan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset (jika ada); (v) amortisasi yang diakui selama periode berjalan; (vi) selisih kurs neto yang

timbul dari penjabaran laporan suatu entitas asing; dan (vii) perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

Kontroversi yang Melingkupi Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud bukanlah sesuatu hal yang baru. Hal yang baru adalah gelombang dramatis dalam ukuran serta pentingnya aset tak berwujud bagi perusahaan sejak awal 1980-an. Bukti tidak langsung dari kemunculan tersebut terdapat di dalam nilai yang terus meningkat dari rata-rata *market-to-book ratio* pada perusahaan-perusahaan S&P 500 selama jangka waktu dua puluh tahun terakhir – meningkat dari 1.0 ke sekitar 5.0 untuk periode yang berakhir di tahun 2002. Pendorong utama di belakang gelombang dalam aset tak berwujud ini adalah kombinasi unik dari tiga kekuatan ekonomi yang saling berkaitan: kompetisi bisnis yang intensif yang disebabkan oleh globalisasi perdagangan; deregulasi dalam sektor-sektor kunci ekonomi, seperti jasa-jasa telekomunikasi, transportasi, energi, dan keuangan; serta akselerasi dari teknologi informasi, seperti Internet.

Dilihat dari sisi *supply*, informasi sangat mahal untuk diproduksi, tetapi sangat murah untuk direproduksi. Dari sisi *demand*, teknologi informasi dan infrastrukturnya telah secara dramatis meningkatkan *economies of scale* dalam produk-produk informasi dengan menurunkan biaya untuk mengakses dan menggunakannya. Terdapat tiga kelompok utama dari aset tak berwujud: mereka yang diciptakan terutama melalui inovasi dan penemuan, yang berupa praktik-praktik organisasi, serta yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

Dalam penelitiannya Lev dan Sougiannis (1996) meneliti mengenai *reliability, objectivity*, dan *value-relevance* dari pengakuan R&D sebagai suatu aset. Mereka melakukan hal tersebut dengan mengestimasi modal R&D –yang tentu saja tidak disajikan di dalam neraca perusahaan– dari suatu sampel besar perusahaan-perusahaan publik di AS. Kesimpulan mereka adalah estimasi seperti itu secara statistik *reliable* dan secara ekonomi *meaningful*. Ketika mereka lebih lanjut menyesuaikan *reported earnings* dan *book values* dari perusahaan-perusahaan sampel untuk kapitalisasi R&D, mereka menemukan bahwa penyesuaian tersebut meningkatkan informasi untuk investor.

Merek, suatu aset tak berwujud utama yang lazim di dalam produk-produk konsumen – elektronik (Sony), makanan dan minuman (Coca-Cola), dan akhir-akhir ini dalam perusahaan internet (Yahoo!)– sering kali diciptakan dengan suatu kombinasi dari inovasi dan struktur organisasi. Dalam penelitiannya Barth, Clement, Foster, dan Kasznik (1998) menguji apakah nilai dari merek dapat diukur, dan jika dapat, apakah nilai-nilai seperti itu dimasukkan dalam penilaian investor. Mereka melakukan penelitian terhadap suatu set perusahaan yang nilai mereknya diestimasi oleh Interbrand Ltd. (suatu perusahaan konsultan) dan menemukan bahwa perkiraan nilai-nilai merek tersebut secara positif dan signifikan berkaitan dengan nilai pasar saham serta *return* saham perusahaan, di atas efek terhadap nilai pasar dari *advertising expenses, operating margin, market share*, serta *analyst earnings forecasts*.

Modal intelektual juga merupakan suatu aset tak berwujud yang powerful, seperti yang diilustrasikan oleh Zucker, Darby, dan Brewer (1998). Mereka menginvestigasi hubungan antara modal intelektual dari “*star*” *scientist* yang melakukan penemuan-penemuan awal, dampak dari program-program *bioscience* universitas yang besar, serta munculnya modal ventura di dalam pendirian perusahaan-perusahaan bioteknologi AS selama periode 1976-1989. Mereka menemukan bahwa pendirian serta lokasi dari perusahaan-perusahaan bioteknologi yang baru ditentukan terutama oleh ukuran dari modal intelektual, terutama oleh jumlah “*star*” *scientist* perusahaan yang secara aktif mempublikasikan penemuan-penemuannya. Mereka berkesimpulan bahwa –setidaknya pada awal proses pembentukan perusahaan– “*star*” *scientist* langka, faktor produksi yang tidak tergeser yang modal intelektual memungkinkan mereka untuk menangkap *supranormal economic returns*.

Aset tak berwujud, melebihi aset berwujud dalam sebagian besar perusahaan bisnis, baik dalam nilai maupun dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan perusahaan. Namun demikian, dengan akuntansi tradisional mereka lebih sering langsung dibebankan ke laporan laba rugi, dengan demikian mereka tetap absen dari neraca perusahaan. Bagaimanapun, masalahnya tidak terbatas pada neraca perusahaan. Laporan keuangan serta pengungkapan perusahaan lainnya jarang menyediakan informasi yang relevan (dalam catatan kaki atau artikulasi lainnya) pada aspek-aspek penting dari aset tak berwujud, seperti jumlah yang dikeluarkan untuk *software*, *training* pegawai, penguatan merek, dan aset tak berwujud lainnya. Hal ini membawa kepada pelaporan yang kurang serta bias dari kinerja dan nilai perusahaan. Boone dan Raman (2001) menemukan bukti yang menghubungkan antara kurangnya pelaporan R&D dengan konsekuensi peningkatan biaya modal, yang kemudian menghalangi investasi dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini menimbulkan kerusakan sosial.

Alternatif Pemecahan Masalah

Baruch Lev mengajukan suatu sistem informasi yang komprehensif yang menekankan pada kinerja dan kapabilitas perusahaan bisnis modern. Karena beberapa dari informasi yang diajukan tidak didasarkan pada transaksi dan tidak bercirikan keuangan, misalkan: kualitas paten, sistem tersebut berkembang melebihi batas-batas akuntansi tradisional. Tujuan dari sistem informasi yang diajukan adalah untuk memfasilitasi dua kekuatan utama yang menjadi karakter ekonomi modern: demokratisasi dan eksternalisasi dari proses pembuatan keputusan baik di dalam organisasi dan di dalam pasar modal. Yang pertama, demokratisasi pasar modal direfleksikan dalam peningkatan peran para individual dalam pasar tersebut. Makin banyak investor individual yang berharap melakukan analisis investasi mereka sendiri dan membentuk portofolio sendiri. Informasi yang umumnya tidak tersedia adalah informasi tentang aset tak berwujud. Kedua, dalam korporasi modern makin banyak keputusan penting dibuat bersama dengan entitas yang terletak di luar batas-batas hukum suatu perusahaan: pelanggan, rekanan aliansi, penyedia jasa-jasa yang di-*outsourc*e dan seterusnya. Eksternalisasi dari pembuatan keputusan seperti ini tentu saja secara mendasar berbeda dengan pembuatan keputusan berdasarkan desentralisasi dalam perusahaan, dan meningkatkan secara signifikan ruang lingkup informasi yang dibutuhkan oleh manajer dan investor.

Dasar dari Sistem Informasi yang Diusulkan

Suatu analisis dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan dalam konferensi antara para manajer dengan para analis keuangan, juga dari survei terhadap pengungkapan sukarela oleh perusahaan mengindikasikan bahwa informasi yang paling relevan terhadap pembuat keputusan dalam lingkungan ekonomi saat ini berkaitan dengan *value chain* perusahaan. Hal ini juga merupakan informasi yang umumnya tidak disampaikan oleh sistem akuntansi secara tepat waktu. Yang dimaksud dengan *value chain* menurut Baruch Lev adalah suatu proses ekonomi yang mendasar atas suatu inovasi, yang sangat penting bagi kelangsungan hidup serta kesuksesan perusahaan bisnis. Hal tersebut dimulai dengan penemuan suatu produk atau jasa atau proses baru, dikerjakan melalui tahap pengembangan dari penemuan ini dan dibuat dengan teknologi yang memungkinkan, serta berakhir dengan komersialisasi dari produk atau jasa baru tersebut.

SIMPULAN

The value chain blueprint menyediakan suatu sistem informasi untuk digunakan baik dalam pembuatan keputusan internal serta pengungkapan kepada investor. Indikator *blueprint* yang spesifik harus dapat memenuhi tiga kriteria untuk memastikan kegunaan yang maksimal. Pertama, mereka seharusnya kuantitatif. Aspek-aspek kualitatif dari *value chain* (seperti praktik-praktik kerja pegawai) dapat disediakan dalam pengungkapan tambahan. Kedua, mereka seharusnya terstandarisasi, yang

berarti mereka dapat dibandingkan dengan perusahaan lainnya untuk tujuan penilaian dan *benchmarking*. Ketiga, dan yang terpenting, mereka seharusnya dapat diperkuat dengan bukti-bukti empiris yang relevan bagi pengguna (umumnya dengan membentuk suatu asosiasi statistik yang signifikan antara ukuran dan indikator dari nilai perusahaan seperti *return* saham dan peningkatan produktivitas).

DAFTAR PUSTAKA

- Bariati, D. D. (2002). *Opportunities and Threat in the Commencing of APEC and AFTA Agreements towards BRI Foreign Exchange Transactions*. Karya Akhir MMUI.
- Barth, M., Clement, M., Foster, G., and Kasznik, R. (1998). Brand Values and Capital Market Valuation. *Review of Accounting Studies*, 3(1/2), 41-68.
- Boone, J. P., and Raman, K. K. (2001). Off-balance Sheet R&D Assets And Market Liquidity. *Journal of Accounting and Public Policy*, 20(2), 97-128.
- Cowan, A. L. (1991, 2 Desember). Kemajuan Peraturan Akuntansi Internasional. The New York Times.
- Hand, J., and Lev, B. (2003). *Intangible Assets—Values, Measures, and Risks*. USA: Oxford University Press.
- Hartono, B. (2001). Pelaporan dan Pengukuran Financial Instrument Berdasarkan Fair Value. *Media Akuntansi*, No.16 Januari 2001, hal. 2-6.
- IAI. (2010). *PSAK No.19 (revisi 2010): Aset Tak Berwujud*. Jakarta.
- Lev, B., and Sougiannis, T. (1996). The Capitalization, Amortization, and Value-Relevance of R&D. *Journal of Accounting and Economics*, 21, 107-138.
- Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. C., and Edvinsson, L. (1997). *Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape*. London: Macmillan.
- Sawarjuwono, T., dan Kadir, A. P. (2003). Intellectual Capital: Perlakuan, Pengukuran dan Pelaporan (sebuah Library Research). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1).
- Wallman, S. M. H. (1995). The Future of Accounting and Disclosure in an Evolving World: the Need for Dramatic Change. *Accounting Horizons*, 9(3), 81-91.
- Zucker, L. G., Darby, M. R., and Brewer, M. B. (1998). Intellectual Human Capital and the Birth of U.S. Biotechnology Enterprises. *American Economic Review*, 88(1), 290-306.